



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

2014

<http://kepsulkab.bpsgo.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2010- 2014**

Nomor Publikasi : 82035.1504
Katalog BPS : 9302002.8203

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 59 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2010- 2014**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Salahuddin, M.Si

Editor : Indra Tri Mahardika

Penulis : Silkya Nurul Hanifin

Pengolah data : Silkya Nurul Hanifin

<http://kepsulkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sanana, Oktober 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Kepulauan Sula,

Ir. Salahuddin, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.5 Perubahan Inventori	17
2.6 Ekspor dan Impor	20
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010-2014	23
.....	
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Pengeluaran	24 28
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	32
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	32
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	32
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	35
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	36
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	37
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	38

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010-2014	40
4.1	PDRB (Nominal)	41
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	42
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	42
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	43
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	44
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	45
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	45
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	46
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	47
	PENUTUP	49
	LAMPIRAN	51
	DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014	24
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014	25
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	26
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	27
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	28
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014	28
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014	30
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2014.....	31
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2014	31
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	32
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	33
Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	34
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	36
Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	36
Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	37
Tabel 16. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	38
Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	41
Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010-2014.....	42

Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010-2014.....	43
Tabel 20.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	43
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010-2014.....	44
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	45
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	45
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	47
Tabel 25.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014.....	48

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014	25

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	52
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	52
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	53
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	53
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	54
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	54
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014.....	56

<http://kepsulkab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II
METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<http://kepuilkab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PEB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank

Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten/Kota mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota; b. PK-Pemerintah Provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota; c. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten/Kota Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten/Kota, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten/Kota + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah Kabpaten/Kota tersebut + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari

PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah

barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *menginflate* perubahan inventori *adh Konstan* dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non

residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<http://kepsulkab.bps.go.id>

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
KEPULAUAN SULA BERDASARKAN PDRB
MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN
KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 - 2014**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB KABUPATEN KEPULAUAN SULA MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2104**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	902,13	987,92	1.070,83	809,98	893,90
2. Konsumsi LNPRT	5,83	6,39	7,11	7,53	8,74
3. Konsumsi Pemerintah	314,20	367,28	409,46	348,39	391,21
4. PMTB	373,97	456,20	522,23	393,01	452,78
5. Perubahan Inventori	114,26	-82,28	133,38	111,13	-125,41
6. Ekspor	1.363,75	1.455,55	1.621,23	1.028,02	1.546,39
7. Impor	1.542,03	1.460,53	1.809,17	1.288,59	1.578,64
Total PDRB	1.532,11	1.730,53	1.955,07	1.409,47	1.588,97

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Sula (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d. 2012 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Kemudian pada periode 2013 s.d. 2014,

nilai PDRB Kabupaten Kepulauan Sula juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula terlihat menurun, hal ini disebabkan karena ada wilayah administratif dari Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu Pulau Taliabu yang menjadi kabupaten baru pada tahun 2013. Sehingga sejak tahun 2013, penghitungan PDRB Pulau Taliabu sudah terpisah dari Kabupaten Kepulauan Sula. Pada awalnya (sebelum tahun 2013), penghitungan PDRB Kabupaten Kepulauan Sula mencakup Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

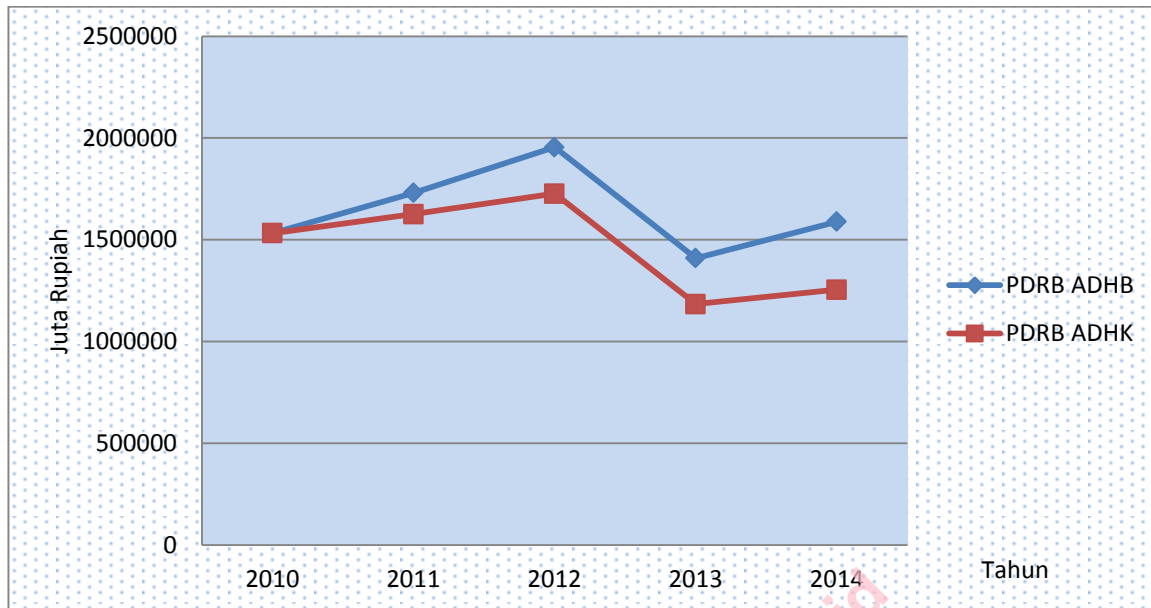
<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	902,13	945,77	989,48	701,25	726,93
2. Konsumsi LNPRT	5,83	6,27	6,70	6,87	7,35
3. Konsumsi Pemerintah	314,20	346,39	364,42	293,10	313,03
4. PMTB	373,97	436,11	484,53	360,93	384,42
5. Perubahan Inventori	114,26	-74,45	119,97	-204,69	-63,18
6. Ekspor	1.363,75	1.385,43	1.427,63	836,21	1.130,72
7. Impor	1.542,03	1.419,90	1.665,93	809,36	1.244,29
Total PDRB	1.532,11	1.625,62	1.726,80	1.184,31	1.254,83

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014



* Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru

Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2104**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	58,88	57,09	54,77	57,47	56,26
2. Konsumsi LNPRT	0,38	0,37	0,36	0,53	0,55
3. Konsumsi Pemerintah	20,51	21,22	20,94	24,72	24,62
4. PMTB	24,41	26,36	26,71	27,88	28,49
5. Perubahan Inventori	7,46	-4,75	6,82	7,89	-7,89
6. Ekspor Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7. Impor Luar Negeri	0,05	0,00	0,00	0,00	0
8. Net Ekspor Antar Daerah	-11,59	-0,29	-9,60	-18,49	-2,03
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen), Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mempunyai peran yang relatif besar, karena memiliki *share* terhadap PDRB berkisar antara 24 s.d. 28 persen pada tahun 2010 s.d. 2014. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 20 - 35 persen, Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Pada tahun 2010-2014 perdagangan internasional Kabupaten Kepulauan Sula yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa hanya terjadi perdagangan internasional secara langsung (impor dari luar negeri) pada tahun 2010, Pada tahun 2011 s.d. 2014 tidak terdapat transaksi perdagangan internasional di Kabupaten Kepulauan Sula. Sementara itu, perdagangan dalam negeri Kabupaten Kepulauan Sula yang direpresentasikan dengan komponen net ekspor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar daerah pada tahun 2010-2014, Kecenderungan perdagangan dalam negeri Kabupaten Kepulauan Sula dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”, hal ini menunjukkan bahwa perdagangan antar daerah di Kabupaten Kepulauan Sula cenderung didominasi oleh impor barang/jasa dari daerah lain.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula
Tahun 2011-2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)			
	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,84	4,62	4,10	3,66
2. Konsumsi LNPR	7,45	6,82	14,46	6,93
3. Konsumsi Pemerintah	10,25	5,21	6,80	6,80
4. PMTB	16,61	11,10	4,66	6,51
5. Perubahan Inventori	-165,15	-261,15	-235,15	-69,13
6. Ekspor Luar Negeri	0	0	0	0
7. Impor Luar Negeri	-100,00	0	0	0
8. Net Ekspor Antar Daerah	-80,59	591,34	-107,99	-523,0
Total PDRB	6,10	6,22	6,29	5,97

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula dari tahun 2010 s,d 2014 secara rata-rata mencapai 6,14 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,10 persen (2011); 6,22 persen (2012); 6,29 persen (2013); dan 5,97 persen (2014), Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,29 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (5,95 persen),

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 - 2014**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,0	104,5	108,2	115,3	123,0
2. Konsumsi LNPRT	100,0	102,0	106,2	110,0	119,0
3. Konsumsi Pemerintah	100,0	106,0	112,4	117,0	125,0
4. PMTB	100,0	104,6	107,8	108,7	117,8
5. Perubahan Inventori	100,0	110,5	111,2	-55,8	198,5
6. Ekspor	-	-	-	-	-
7. Impor	100,0	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,0	14,5	78,9	-212,4	28,4
Total PDRB	100.0	106.5	113.2	118.6	126.2

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa harga barang/jasa secara rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya pada periode tahun 2010 s.d. 2014.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

¹ Indeks perkembangan

**Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010—2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	902,13	987,92	1.070,83	809,98	893,90
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	902,13	945,77	989,48	701,25	726,93
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	58,88	57,09	54,77	57,47	56,26
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	6.780,62	7.283,21	7.744,36	8.861,37	9.567,11
b. ADHK 2010	6.780,62	6.972,43	7.156,01	7.671,79	7.780,09
Jumlah penduduk (000 org)	133.045	135.644	138.272	91.406	93.435

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Data pada Tabel 6, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan). Sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d. 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 58,88 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 54,77 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi. termasuk konsumsi rumah tangga.

Jika dilihat pengeluaran konsumsi secara per-kapita, maka rata-rata konsumsi per-kapita di Kabupaten Kepulauan Sula juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan. baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Kepulauan Sula meningkat,

baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,41 s.d 7,21 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 4,84 persen pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, konsumsi rumah tangga menurun menjadi 4,62 persen dan 4,10 persen. Kemudian, menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 3,66 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perkapita adh Konstan sebesar 2,83 persen pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 konsumsi rumah tangga menurun menjadi 2,63 persen dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 7,21 persen. Kemudian, menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 1,41 persen.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010—2014²

Kelompok Konsumsi (1)	(Persen)				
	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013* (5)	2014** (6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	69,73	67,17	65,69	63,12	61,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,71	4,00	4,15	4,23	4,37
c. Perumahan,Perkakas, Perlengkapan Dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,20	10,49	10,93	11,59	11,72
d. Kesehatan & Pendidikan	3,51	3,48	3,41	3,24	3,27
e.Transportasi, Komunikasi Rekreasi dan Budaya	9,44	9,54	10,17	11,49	12,01
f.Hotel & Restoran	0,94	0,95	1,08	1,47	1,52
g. Lainnya	4,27	4,36	4,57	4,84	5,14
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada table 7, nampak struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Kepulauan Sula. Dari table 7, terlihat bahwa konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga yang lainnya. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 67,93 persen (2010); 67,17 persen (2011); 65,69 persen (2012); 63,12 persen (2013); dan 61,97 persen (2014). Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, minuman, dan rokok menjadi semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pengeluaran untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga juga mempunyai peranan yang relatif besar terhadap konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi sekitar 10,20 s.d 11,72 persen. Berbeda dengan pola proporsi konsumsi untuk makanan, minuman, dan rokok yang cenderung mengalami trend menurun dari tahun ke tahun, pola proporsi konsumsi untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga cenderung

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

meningkat selama periode 2010 s.d. 2014. Proporsi konsumsi untuk perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga pada masing-masing tahun mencapai 10,20 persen (2010); 10,49 persen (2011); 10,93 persen (2012); 11,59 persen (2013); dan 11,72 persen (2014).

<http://kepsulkab.bps.go.id>

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011—2014

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.43	3.61	2.92	2.50
b. Pakaian dan Alas Kaki	5.03	5.57	4.00	4.00
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5.59	5.81	7.19	6.09
d. Kesehatan dan Pendidikan	4.96	3.02	4.00	6.13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.42	9.35	6.90	6.57
f. Hotel dan Restoran	5.73	12.24	11.53	5.77
g. Lainnya	7.79	6.01	5.79	5.15

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya. pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan pola yang menurun pada periode 2011 s.d. 2014. Dengan pertumbuhan “riil” pada masing-masing tahun sebesar 4,43 persen (2011); 3,61 persen (2012); 2,92 persen (2013); dan 2,50 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Nilai pertumbuhan “riil” yang positif menunjukkan adanya peningkatan kuantitas (volume) dalam hal konsumsi makanan dari waktu ke waktu, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya peningkatan kemakmuran masyarakat. Meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011—2014³

(Persen)

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.70	2.31	4.72	5.70
b. Pakaian dan Alas Kaki	12.16	6.72	9.32	9.62
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6.74	6.69	11.42	5.11
d. Kesehatan dan Pendidikan	3.48	2.86	3.14	4.89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.99	5.66	11.85	8.24
f. Hotel dan Restoran	5.34	9.13	1.86	7.76
g. Lainnya	3.65	7.24	11.29	11.35

³ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

*Angka Sementara

*Angka Sangat Sementara

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 3,70 persen (2011); 2,31 persen (2012); 4,72 persen (2013); dan 5,70 persen (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 12,16 persen (2011) menjadi 6,72 persen (2012). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 9,32 persen (2013), dan 9,62 persen (2014).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang cukup kecil.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT	5,83	6,39	7,11	7,53	8,74
a. ADHB (Miliar Rp)					
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5,83	6,27	6,70	6,87	7,35
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,38	0,37	0,36	0,53	0,55

*Angka Sementara

*Angka Sangat Sementara

Pengeluaran untuk konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula sekitar 0,36 s.d 0,55 persen. Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu 0,38 persen (2010); 0,37 persen (2011); 0,36 persen (2012); 0,53 persen (2013); dan 0,55 persen (2014). Dengan pertumbuhan “riil” pertahun berkisar antara 5,83 persen s.d. 7,35 persen pada periode 2010 s.d. 2014.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	314,20	367,28	409,45	348,38	391,21
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	314,20	346,39	364,42	293,10	313,03
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	20,51	21,22	20,94	24,72	24,62

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 314,20 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2012 nilainya mencapai 409,45 miliar rupiah. Setelah terpisahnya Pulau Taliabu dari Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku Kabupaten Kepulauan Sula mencapai 348,38 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 391,21 miliar rupiah pada tahun 2014. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan dari 20,51 persen ditahun 2010 hingga mencapai 24,62 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik), atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari

berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁴, Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010—2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	373,97	456,20	522,23	393,01	452,78
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	373,97	436,11	484,53	360,93	384,42
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	24,41	26,36	26,71	27,88	28,49
Struktur PMTB ⁵					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	244,19	273,12	314,09	277,25	321,01
(%)	65,30	59,87	60,14	70,55	70,90
b. Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	129,78	183,08	208,14	115,76	131,77
(%)	34,70	40,13	39,86	29,45	29,10
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	373,97	456,20	522,23	393,01	452,78
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁶ (%)					
a. Bangunan	-	7.36	7.46	2.72	7.55
b. Non Bangunan	-	34.02	16.60	9.39	4.14
Total PMTB	-	16.61	11.10	4.66	6.51

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada table 12 terlihat bahwa nilai total PMTB ADHB pada tahun 2010 sebesar 373,97 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 452,78 miliar rupiah. Begitu juga dengan nilai total PMTB ADHK pada tahun 2010 sebesar 373,97 miliar rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 384,42 miliar rupiah. Proporsi bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 – 2014. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas

⁴ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan pada tahun 2010 sebesar 65,30 persen. Keadaan ini mengalami penurunan menjadi 59,87 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, sub komponen bangunan meningkat kembali yaitu menjadi 60,14 persen, dan terus meningkat pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 70,55 persen dan 70,90 persen.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang relatif sama antar tahunnya. Dalam periode tahun 2010 s.d. 2014 pertumbuhan bangunan cukup relatif lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan komponen non bangunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan bangunan mencapai 7,36 persen, kemudian di tahun 2012 sedikit meningkat menjadi 7,46 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,72 persen pada tahun 2013. Pertumbuhan bangunan kembali meningkat sebesar 7,55 persen pada tahun 2014. Sedangkan Non Bangunan mengalami pertumbuhan cenderung menurun dari tahun 2011 s.d 2014, yaitu dari 34,02 persen tahun 2011 menurun pada tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu sebesar 16,60 persen (2012); 9,39 persen (2013); dan 4,14 persen (2014).

Data pada tabel 12 juga menjelaskan bahwa secara umum pertumbuhan total PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 cenderung menurun dari 16,61 persen pada tahun 2011 menjadi 6,51 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun berfluktuasi tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

<http://kepsulkab.bps.go.id>

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori	114,26	-82,28	133,38	111,13	-125,41
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	114,26	-74,45	119,97	-204,69	-63,18
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	7,46	-4,75	6,82	7,89	-7,89

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2010, 2012, dan 2013 perubahan inventori bertanda positif (terjadi penambahan persediaan barang) yaitu masing-masing sebesar 114,26 miliar rupiah (2010); 133,38 miliar rupiah (2012); dan 111,13 miliar rupiah (2013). Namun pada tahun 2011 dan 2014 perubahan inventori mempunyai tanda negatif yaitu minus 4,75 persen dan minus 7,89 persen.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)					
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 14, terlihat bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula tidak terdapat transaksi perdagangan ekspor secara langsung ke Negara lain, sehingga nilai dari PDRB ekspor barang dan jasa luar negeri selalu kosong dari tahun 2010 s.d 2014.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia, Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu daerah terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	685.3	0,00	0,00	0,00	0,00
b.ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	685.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa selama periode 2010 s.d. 2014, di Kabupaten Kepulauan Sula hanya terdapat transaksi perdagangan impor luar negeri pada tahun 2010, yaitu sebesar 685,3 miliar rupiah dengan proporsi terhadap PDRB sebesar 0,04 persen. Pada tahun 2011

s.d. 2014 tidak terjadi transaksi perdagangan impor luar negeri sehingga total nilai impor luar negeri selalu kosong dari tahun 2011 s.d 2014.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung,

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya,

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 16. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Net Ekspor ADHB (Miliar Rp)	-177,59	-4,98	-187,94	-260,56	-32,25
ADHK 2010 (Miliar Rp)	-177,59	-34,47	-238,29	-26,85	-113,57
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-11,59	-0,29	-9,61	-18,49	-2,03

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pada Tabel 16, terlihat bahwa nilai dari net ekspor pada periode 2010 s.d. 2014 bernilai selalu negatif, ini menunjukkan bahwa lebih besar nilai impor barang/jasa dari daerah lain yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Sula dibandingkan dengan nilai ekspor barang/jasa dari Kabupaten Kepulauan Sula ke daerah lain.

<http://kepsulkab.bps.go.id>

BAB IV

***PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2010 - 2014***

<http://kepulrab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)	1.532,12	1.730,54	1.955,06	1.409,47	1.588,97
- ADHB					
- ADHK 2010	1.532,11	1.625,62	1.726,80	1.184,31	1.254,80
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)	11.515,78	12.757,96	14.139,26	15.419,94	17.006,17
- ADHB					
- ADHK 2010	11.515,78	11.984,46	12.488,42	12.956,59	13.429,73
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-	4,07	4,21	3,75	3,65
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	133.045	135.644	138.272	91.406	93.435

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kepulauan Sula rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu bernilai positif pada periode 2011 s.d. 2014, pertumbuhan PDRB perkapita mencapai 4,07 persen pada tahun 2011 kemudian meningkat menjadi 4,21 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan PDRB per-kapita mengalami

perlambatan menjadi 3,75 persen dan 3,65 persen. PDRB perkapita baik ADHB maupun ADHK, cenderung memiliki pola meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, PDRB ADHK bernilai 11,515 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan selama periode 2010 s.d. 2014 sehingga pada tahun 2014, PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Sula mencapai 13,429 juta rupiah.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Kepulauan Sula (sekitar 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun dalam konsumsi akhir rumah tangga, di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	902,13	987,92	1.070,83	809,98	893,90
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.363,75	1.455,55	1,621,23	1.028,02	1.546,39
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0.66	0.68	0.66	0.79	0.58

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah 0,66 kali dari produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk kebutuhan ekspor. Perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan total ekspor pada periode 2010 s.d. 2014 berkisar pada angka 0,58 sampai dengan 0,79. Hal ini diartikan bahwa sebagian produk yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Sula, lebih dari setengah kalinya nya digunakan untuk diekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap

bruto). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 19. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010—2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	902,13	987,92	1.070,83	809,98	893,90
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	373,97	456,20	522,23	393,01	452,78
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,41	2,17	2,05	2,06	1,97

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,41 pada tahun 2010 menjadi 2,17 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 2,05 (2012), namun sedikit meningkat di tahun 2013 menjadi 2,06 dan kembali menurun menjadi 1,97 (2014). Penurunan rasio konsumsi RT dengan PMTB ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 20. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	902,13	987,92	1.070,83	809,98	893,90
a. Rumah tangga					
b. LNPRT	5,83	6,39	7,11	7,53	8,74
c. Pemerintah	314,20	367,28	409,46	348,39	391,21
Jumlah	1.222,16	1.361,59	1.416,57	1.165,90	1.293,85
PDRB (ADHB) (<i>Miliar Rp</i>)	1.532,12	1.730,54	1.955,06	1.409,47	1.588,97
Proporsi	79,77	78,68	75,56	82,72	81,43

S

**A*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

*Angka Sangat Sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 75 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2010 dan 2011, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami peningkatan, lalu mengalami penurunan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 meningkat kembali menjadi 82,72 persen dan 81,43 persen. Pada tabel 20, dapat dilihat bahwa sebagian besar produk di Kabupaten Kepulauan Sula digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang capital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 21. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010—2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.363,75	1.455,55	1.621,23	1.028,02	1.546,39
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	373,97	456,20	522,23	393,01	452,78
Rasio Ekspor terhadap PMTB	3,65	3,19	3,10	2,62	3,42

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2010 s.d. 2014 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB (tabel 21). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Rasio ekspor terhadap PMTB pada tahun 2010 s.d. 2013 memiliki pola yang menurun. Penurunan tersebut dapat terlihat pada tabel 21, dimana rasio ekspor terhadap PMTB pada tahun 2010 sebesar 3,65 menurun menjadi 2,19 pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 3,10 dan akhirnya menurun kembali pada tahun 2013 menjadi 2,62. Namun pada tahun 2014, rasio ekspor terhadap PMTB mengalami peningkatan menjadi 3,42 kali. Penurunan rasio pada periode 2010 s.d. 2013 diantaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 22. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.532,12	1.730,54	1.955,06	1.409,47	1.588,97
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.542,03	1.460,53	1.809,17	1.288,59	1.578,64
Rasio PDRB terhadap Impor	0.99	1.18	1.08	1.09	1.01

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

*Angka Sangat Sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2010 - 2014 cenderung berfluktuatif, namun selalu mendekati nilai 1,00. Pada tahun 2010 rasio PDRB terhadap impor sebesar 0,99, nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010, Kabupaten Kepulauan Sula memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	1.532,12	1.730,54	1.955,06	1.409,47	1.588,97
%	49,84	54,23	51,94	52,24	50,16
Total Impor ADHB (Miliar Rp)	1.542,03	1.460,53	1.809,17	1.288,59	1.578,64
%	50,16	45,77	48,06	47,76	49,84
Total Permintaan Akhir ⁷ (Miliar Rp)	3.074,15	3.191,07	3.764,23	2.698,06	3.167,61
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah atau luar negeri, dengan rentang 45 s.d. 50 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 55 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 3.074,15 miliar rupiah (2010) menjadi sebesar 3.167,61 miliar rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 1.532,12 miliar rupiah (2010); 1.730,54 miliar rupiah (2011); 1.955,06 miliar rupiah (2012); 1.409,47 miliar rupiah (2013); dan 1.588,97 miliar rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai

⁷ Termasuk diskrepansi statistik

produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.542,03 miliar rupiah (2010); 1.460,53 miliar rupiah (2011); 1.809,17 miliar rupiah (2012); 1.288,59 miliar rupiah (2013); dan 1.578,64 miliar rupiah (2014).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya jika posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor. Meskipun hanya berlaku secara total, namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya,

**Tabel 24. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.363,75	1.455,55	1.621,23	1.028,02	1.546,39
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.542,03	1.460,53	1.809,17	1.288,59	1.578,64
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	-178,28	-4,98	-187,94	-260,57	-32,25
Rasio ekspor terhadap Impor	0,88	1,00	0,90	0,80	0,98

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selama periode 2010 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negative. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula selalu dalam posisi defisit. Defisit perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula yang terjadi antara tahun 2010 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar minus 178,28 miliar rupiah (2010); minus 4,98 miliar rupiah

(2011); minus 187,94 miliar rupiah (2012); minus 260,57 miliar rupiah (2013); dan minus 32,25 miliar rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,88 menjadi sekitar 1,00 pada tahun 2011; kemudian 0,90 pada tahun 2012; 0,80 pada tahun 2013 dan 0,98 pada tahun 2014.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit, Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 25. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(miliar rupiah)	1.532,11	1.625,62	1.726,80	1.184,31	1.254,80
Perubahan (miliar rupiah)	-	93,50	101,18	70,07	70,50
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	373,97	436,11	484,53	360,93	384,42
ICOR	-	4,66	4,79	5,15	5,45

*Angka Sementara (Pada Tahun 2013, Pulau Taliabu terpisah menjadi kabupaten baru)

**Angka Sangat Sementara*

Data di atas menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Kepulauan Sula terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 4,14 pada 2011 menjadi 4,17 pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 4,61 pada tahun 2013, kemudian kembali meningkat menjadi 5,25 pada tahun 2014.

<http://kepsulkab.bps.go.id>

<http://kepsulkab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d. 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d. 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://kepsulkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	902.127,0	987.923,8	1.070.828,1	809.982,3	893.902,9
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	612.788,9	663.635,7	703.471,3	511.261,5	553.930,1
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	33.512,1	39.479,2	44.478,1	34.272,3	39.071,6
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	91.976,3	103.658,1	117.015,8	93.915,0	104.729,9
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	31.683,9	34.415,0	36.467,5	26.273,9	29.248,2
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	85.154,1	94.242,8	108.889,0	93.099,6	107.393,7
1.f. Hotel dan Restoran	8.452,6	9.413,8	11.531,2	11.931,9	13.599,6
1.g. Lainnya	38.559,1	43.079,2	48.975,2	39.228,2	45.929,8
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5.834,6	6.394,7	7.109,8	7.532,7	8.743,8
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	314.203,0	367.278,1	409.455,3	348.384,7	391.206,4
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	373.974,1	456.203,2	522.230,1	393.011,0	452.776,8
4.a. Bangunan	244.193,6	273.120,6	314.092,9	277.254,9	321.006,2
4.b. Non-Bangunan	129.780,4	183.082,6	208.137,2	115.756,2	131.770,6
5. Perubahan Inventori	114.262,9	(82.277,5)	133.385,4	111.129,4	(125.407,7)
6. Ekspor Luar Negeri	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri	685,3	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(177.598,9)	(4.981,9)	(187.945,3)	(260.564,8)	(32.250,3)
8.a. Ekspor	1.363.748,6	1.455.551,5	1.621.229,5	1.028.022,6	1.546.389,8
8.b. Impor	1.541.347,5	1.460.533,4	1.809.174,8	1.288.587,4	1.578.640,1
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.532.117,3	1.730.540,4	1.955.063,4	1.409.475,3	1.588.971,8

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	902.127,0	945.768,4	989.476,3	701.247,2	726.932,6
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	612.788,9	639.930,8	663.049,9	460.171,0	471.686,0
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	33.512,1	35.199,4	37.159,2	26.192,8	27.240,5
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	91.976,3	97.116,4	102.754,4	74.015,8	78.523,4
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	31.683,9	33.256,3	34.260,3	23.933,0	25.399,3
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	85.154,1	89.766,5	98.160,1	75.032,4	79.960,5
1.f. Hotel dan Restoran	8.452,6	8.936,8	10.031,1	10.190,2	10.778,4
1.g. Lainnya	38.559,1	41.562,3	44.061,3	31.712,0	33.344,5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5.834,6	6.269,1	6.696,6	6.869,7	7.345,6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	314.203,0	346.393,9	364.424,4	293.102,0	313.032,9
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	373.974,1	436.105,5	484.527,6	360.929,1	384.422,5
4.a. Bangunan	244.193,6	262.174,2	281.723,2	251.121,4	270.069,2
4.b. Non-Bangunan	129.780,4	173.931,4	202.804,4	109.807,7	114.353,3
5. Perubahan Inventori	114.262,9	(74.447,9)	119.972,2	(204.688,0)	(63.183,4)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	685,3	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(177.598,9)	(34.469,1)	(238.298,7)	26.850,2	(113.567,2)
8.a. Ekspor	1.363.748,6	1.385.427,3	1.427.626,7	836.210,2	1.130.724,2
8.b. Impor	1.541.347,5	1.419.896,4	1.665.925,5	809.360,1	1.244.291,4
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.532.117,3	1.625.619,9	1.726.798,4	1.184.310,2	1.254.983,1

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	58,88	57,09	54,77	57,47	56,26
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	40,00	38,35	35,98	36,27	34,86
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,19	2,28	2,28	2,43	2,46
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,00	5,99	5,99	6,66	6,59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,07	1,99	1,87	1,86	1,84
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,56	5,45	5,57	6,61	6,76
1.f. Hotel dan Restoran	0,55	0,54	0,59	0,85	0,86
1.g. Lainnya	2,52	2,49	2,51	2,78	2,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,38	0,37	0,36	0,53	0,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	20,51	21,22	20,94	24,72	24,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,41	26,36	26,71	27,88	28,49
4.a. Bangunan	15,94	15,78	16,07	19,67	20,20
4.b. Non-Bangunan	8,47	10,58	10,65	8,21	8,29
5. Perubahan Inventori	7,46	(4,75)	6,82	7,88	(7,89)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,04	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(11,59)	(0,29)	(9,61)	(18,49)	(2,03)
8.a. Ekspor	89,01	84,11	82,92	72,94	97,32
8.b. Impor	100,60	84,40	92,54	91,42	99,35
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	58,88	58,18	57,30	59,21	57,93
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	40,00	39,37	38,40	38,86	37,59
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,19	2,17	2,15	2,21	2,17
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,00	5,97	5,95	6,25	6,26
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,07	2,05	1,98	2,02	2,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,56	5,52	5,68	6,34	6,37
1.f. Hotel dan Restoran	0,55	0,55	0,58	0,86	0,86
1.g. Lainnya	2,52	2,56	2,55	2,68	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,38	0,39	0,39	0,58	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	20,51	21,31	21,10	24,75	24,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	24,41	26,83	28,06	30,48	30,64
4.a. Bangunan	15,94	16,13	16,31	21,20	21,52
4.b. Non-Bangunan	8,47	10,70	11,74	9,27	9,11
5. Perubahan Inventori	7,46	(4,58)	6,95	(17,28)	(5,04)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,04	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(11,59)	(2,12)	(13,80)	2,27	(9,06)
8.a. Ekspor	89,01	85,22	82,67	70,61	90,11
8.b. Impor	100,60	87,34	96,47	68,34	99,18
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9,51	8,39	11,23	10,36	
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,30	6,00	8,23	8,35	
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	17,81	12,66	13,03	14,00	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,70	12,89	19,67	11,52	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,62	5,96	8,93	11,32	
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,67	15,54	18,73	15,35	
1.f. Hotel dan Restoran	11,37	22,49	13,80	13,98	
1.g. Lainnya	11,72	13,69	15,42	17,08	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,60	11,18	18,41	16,08	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	16,89	11,48	12,29	12,29	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	21,99	14,47	5,02	15,21	
4.a. Bangunan	11,85	15,00	3,23	15,78	
4.b. Non-Bangunan	41,07	13,68	9,55	13,83	
5. Perubahan Inventori	(172,01)	(262,12)	(33,00)	(212,85)	
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	(100,00)	-	-	-	
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(97,19)	3.672,57	(18,39)	(87,62)	
8.a. Ekspor	6,73	11,38	12,91	50,42	
8.b. Impor	(5,24)	23,87	4,79	22,51	
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	12,95	12,97	11,37	12,73	

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,84	4,62	4,10	3,66	
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,43	3,61	2,92	2,50	
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,03	5,57	4,00	4,00	
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,59	5,81	7,19	6,09	
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,96	3,02	4,00	6,13	
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,42	9,35	6,90	6,57	
1.f. Hotel dan Restoran	5,73	12,24	11,53	5,77	
1.g. Lainnya	7,79	6,01	5,79	5,15	
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,45	6,82	14,46	6,93	
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	10,25	5,21	6,80	6,80	
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	16,61	11,10	4,66	6,51	
4.a. Bangunan	7,36	7,46	2,72	7,55	
4.b. Non-Bangunan	34,02	16,60	9,39	4,14	
5. Perubahan Inventori	(165,15)	(261,15)	(235,15)	(69,13)	
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	(100,00)	-	-	-	
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(80,59)	591,34	(107,99)	(523,62)	
8.a. Ekspor	1,59	3,05	8,51	35,22	
8.b. Impor	(7,88)	17,33	(26,87)	53,74	
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,10	6,22	6,29	5,97	

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	109,51	108,39	111,23	110,36
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	108,30	106,00	108,23	108,35
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	117,81	112,66	113,03	114,00
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	112,70	112,89	119,67	111,52
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	108,62	105,96	108,93	111,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	110,67	115,54	118,73	115,35
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	111,37	122,49	113,80	113,98
1.g. Lainnya	100,00	111,72	113,69	115,42	117,08
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	109,60	111,18	118,41	116,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	116,89	111,48	112,29	112,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	121,99	114,47	105,02	115,21
4.a. Bangunan	100,00	111,85	115,00	103,23	115,78
4.b. Non-Bangunan	100,00	141,07	113,68	109,55	113,83
5. Perubahan Inventori	100,00	(72,01)	(162,12)	67,00	(112,85)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	2,81	3.772,57	81,61	12,38
8.a. Ekspor	100,00	106,73	111,38	112,91	150,42
8.b. Impor	100,00	94,76	123,87	104,79	122,51
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	112,95	112,97	111,37	112,73

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,84	104,62	104,10	103,66
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	104,43	103,61	102,92	102,50
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	105,03	105,57	104,00	104,00
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	105,59	105,81	107,19	106,09
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,96	103,02	104,00	106,13
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	105,42	109,35	106,90	106,57
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	105,73	112,24	111,53	105,77
1.g. Lainnya	100,00	107,79	106,01	105,79	105,15
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	107,45	106,82	114,46	106,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	110,25	105,21	106,80	106,80
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	116,61	111,10	104,66	106,51
4.a. Bangunan	100,00	107,36	107,46	102,72	107,55
4.b. Non-Bangunan	100,00	134,02	116,60	109,39	104,14
5. Perubahan Inventori	100,00	(65,15)	(161,15)	(135,15)	30,87
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	19,41	691,34	(7,99)	(423,62)
8.a. Ekspor	100,00	101,59	103,05	108,51	135,22
8.b. Impor	100,00	92,12	117,33	73,13	153,76
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,10	106,22	106,29	105,95

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Persen)					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,46	108,22	115,51	122,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	103,70	106,10	111,10	117,44
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	112,16	119,70	130,85	143,43
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	100,00	106,74	113,88	126,89	133,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	103,48	106,44	109,78	115,15
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	104,99	110,93	124,08	134,31
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	105,34	114,95	117,09	126,17
1.g. Lainnya	100,00	103,65	111,15	123,70	137,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	102,00	106,17	109,65	119,03
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	106,03	112,36	118,86	124,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	104,61	107,78	108,89	117,78
4.a. Bangunan	100,00	104,18	111,49	110,41	118,86
4.b. Non-Bangunan	100,00	105,26	102,63	105,42	115,23
5. Perubahan Inventori	100,00	110,52	111,18	(54,29)	198,48
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	100,00	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	14,45	78,87	(970,44)	28,35
8.a. Ekspor	100,00	105,06	113,56	122,94	136,76
8.b. Impor	100,00	102,86	108,60	159,21	126,85
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	106,45	113,22	119,01	126,61

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010-2014

(Persen)				
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,46	3,60	6,73	6,46
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,70	2,31	4,72	5,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	12,16	6,72	9,32	9,62
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,74	6,69	11,42	5,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,48	2,86	3,14	4,89
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,99	5,66	11,85	8,24
1.f. Hotel dan Restoran	5,34	9,13	1,86	7,76
1.g. Lainnya	3,65	7,24	11,29	11,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,00	4,09	3,28	8,56
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	6,03	5,97	5,79	5,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	4,61	3,03	1,03	8,17
4.a. Bangunan	4,18	7,02	(0,97)	7,66
4.b. Non-Bangunan	5,26	(2,50)	2,72	9,31
5. Perubahan Inventori	10,52	0,60	(148,83)	(465,58)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(85,55)	445,69	(1.330,44)	(102,92)
8.a. Ekspor	5,06	8,09	8,26	11,24
8.b. Impor	2,86	5,58	46,60	(20,32)
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	6,45	6,35	5,12	6,39

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://kepsulkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://kepsulkab.bps.go.id>

KOMSUMSI

EKSPOR-IMPOR

PMTB



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Jln. Yos Sudarso KM. 10 Pohea, Sanana-Utara, Kepulauan Sula

Email: bps8203@bps.go.id, website: <http://kepsulkab.bps.go.id>